

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Minggu ke-3 Bulan Februari 2021 (tanggal 13 s.d. 18)



KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Yuni Sudarwati
Peneliti Muda/Manajemen dan Kebijakan
yuni.sudarwati@dpr.go.id

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pemerintah akan memberikan insentif melalui pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan itu diambil tentu dilandasi dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan terpenting misalnya, industri otomotif merupakan salah satu industri manufaktur yang mengalami penurunan sangat parah dan memiliki *multiplier effect* yang besar. Pemerintah berharap bahwa relaksasi ini akan memberikan dampak positif berantai ke sektor-sektor manufaktur pendukung otomotif dan industri pembiayaan. Dengan insentif ini konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah-atas diskenariokan akan meningkat dan meningkatkan utilisasi industri otomotif, kondisi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Selain itu, dengan relaksasi harga mobil baru akan lebih murah dan mendekati daya beli konsumen sehingga diharapkan akan merangsang pemulihan produksi dan penjualan. Dengan demikian, jika pemulihan itu dapat terdorong, dampaknya akan dapat dirasakan secara luas bagi sektor industri lain yang berhubungan dengan industri otomotif seperti industri komponen dan industri terkait rantai distribusi. Industri terkait rantai distribusi di antaranya keberadaan *dealer*, lembaga pembiayaan, dan lembaga layanan purna jual.

FUNGSI DPR

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan relaksasi terutama terkait hasil evaluasi yang rencananya akan dilakukan setiap tiga bulan.
2. Melakukan *review* atas kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai dukungan politik konkret DPR agar masyarakat merasa aman sehingga daya beli masyarakat dapat tumbuh kembali.

ATENSI DPR RI

Stimulus pajak untuk menyelesaikan permasalahan dalam industri otomotif merupakan opsi yang *viable* namun juga perlu sikap hati-hati dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu dilandasi satu argumen bahwa penurunan tingkat konsumsi kelas menengah-atas bukan karena hilangnya daya beli, melainkan lebih pada upaya menahan konsumsi karena kekhawatiran akan pandemi. Untuk mendorong pemulihan tingkat konsumsi mereka, satu-satunya jalan ialah menghilangkan kekhawatiran dan membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka. Untuk itu, kata kuncinya keseriusan penanganan dan penanggulangan pandemi mutlak diutamakan. Dengan demikian, pesan pentingnya adalah jika ingin meningkatkan daya beli masyarakat, pilihan pemberian insentif untuk mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan akan lebih tepat sasaran.

DPR RI, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, seharusnya memastikan agar penanganan Covid-19 segera tuntas sehingga masyarakat merasa aman. Dengan tercapainya rasa aman tersebut, pada akhirnya akan mendorong mereka untuk berbelanja dan kembali memiliki daya beli sehingga insentif ini dapat menjadi salah satu daya ungkit bagi perekonomian nasional. Pada gilirannya, arti penting kebijakan insentif bagi industri otomotif ini tidak akan sia-sia dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

SUMBER

Republika, 13 Februari 2021; Media Indonesia, 13 Februari 2021; Bisnis Indonesia 15 Februari 2021; Republika, 15 Februari 2021; Kompas, 16 Februari 2021.